



KEMISKINAN, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nadina Salsabila Anfa¹⁾, Selfia Bintariningtyas²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author: salsabila.nadina@gmail.com

ABSTRAK

Distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata dapat menimbulkan masalah tambahan, seperti kemiskinan dan kecemburuan sosial di antara masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perilaku kriminal jika tidak ditangani dengan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab disparitas pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2011 hingga 2021. Analisis regresi data panel digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari sumber terpercaya seperti artikel ilmiah, jurnal, dan *website* pemerintah (seperti Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang dianggap relevan dengan tujuan kajian. Temuan menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2021, disparitas pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan dipengaruhi oleh kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pengangguran. Pengangguran memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan, sedangkan kemiskinan dan pendidikan keduanya memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Kata Kunci: Disparitas Pendapatan, *Gini Ratio*, Kemiskinan, Pendidikan, Pengangguran

JEL Klasifikasi: D31, D31, I32, I21, J64

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

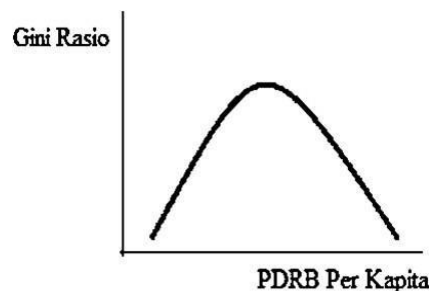


1. PENDAHULUAN

Baik negara industri maupun negara berkembang menyadari kebutuhan pembangunan ekonomi, dan keduanya menyadari kebutuhan untuk mengujarnya bersamaan dengan keadilan ekonomi agar tidak memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Kehadiran keadilan ekonomi, di sisi lain, dapat memperparah kemiskinan jika tidak dibarengi dengan kemajuan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi disertai dengan penyempitan kesenjangan pendapatan, kita dapat mengatakan bahwa pembangunan ekonomi telah berhasil. Disparitas dalam pendapatan merupakan masalah masyarakat yang dapat menyebabkan masalah lebih lanjut seperti kemiskinan dan kebencian di antara kelompok orang, serta aktivitas kriminal, jika tidak ditangani dengan cepat (Damanik, Zulgani, & Rosmeli, 2018). Mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk mempersempit kesenjangan pendapatan yang berkontribusi terhadap begitu banyak permasalahan dunia.

Williamson, pada tahun 1975, menggunakan indikator yang merupakan modifikasi dari standar deviasi untuk menguji sejauh mana perbedaan di berbagai negara dengan berbagai tingkat pembangunan. Dengan meningkatnya nilai indeks, disparitas wilayah meningkat. Untuk negara-

negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, nilai indeks akan naik lebih jauh. Jika membandingkan dampak *backwash effect* yang negatif karena menyangkut perpindahan orang dan modal dari pinggiran ke pusat pertumbuhan, dengan *spread effect* yang positif karena menyangkut perpindahan aktivitas investasi dari pusat pertumbuhan ke pinggiran, disparitas dapat muncul karena adanya distribusi pendapatan yang semakin timpang. Hipotesis U Terbalik Kuznets memprediksi bahwa perbedaan pendapatan akan meningkat selama tahun-tahun pembentukan suatu negara, tetapi kemudian meningkat setelah mencapai massa kemakmuran ekonomi yang kritis. Jika memplotnya dalam grafik, akan tampak seperti U terbalik. Indeks Gini, yang sesuai dengan produk regional bruto per kapita, digunakan untuk memplot rangkaian waktu perubahan distribusi pendapatan, yang digambarkan oleh kurva.



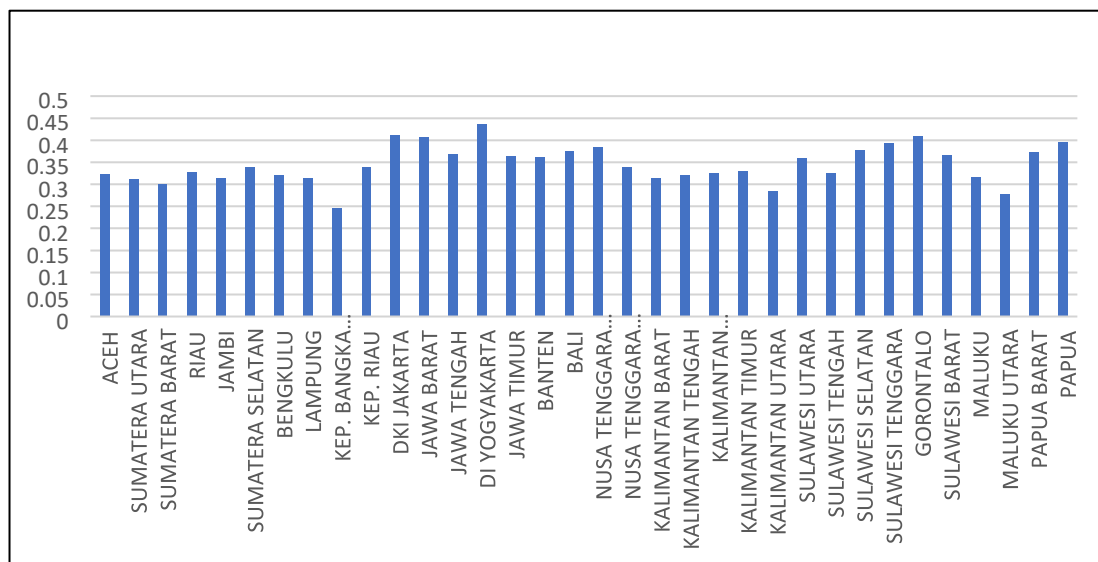
Gambar 1. Kurva Kuznet

Terdapat kaitan antara besaran pembangunan ekonomi nasional suatu negara dan disparitas pembangunan antar wilayah yang diprediksikan, yang biasa dikenal dengan Hipotesis Neo-Klasik, seperti yang ditunjukkan oleh Douglas C. North dalam pengujian Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Selama tahap awal pembangunan suatu negara, jika proses pertumbuhan terus berlanjut, maka ketimpangan pembangunan daerah akan memuncak, dan kemudian semakin menyempit. Ada dua jenis ketimpangan yang dapat diukur ketika membahas distribusi pendapatan: ketimpangan absolut, di mana pendapatan sekelompok orang dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh seluruh masyarakat, dan ketimpangan relatif, di mana pendapatan sekelompok orang dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh bagian tertentu dari populasi.

Disparitas pendapatan dapat ditunjukkan dengan perbedaan pendapatan perkapita di setiap Kota/Kabupaten di suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan ini mungkin bertanggung jawab atas peningkatan pendapatan per kapita. Dalam situasi ini, tujuan pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk memodernisasi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan kondisi kehidupan setiap orang. Jika kemajuan ekonomi mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih tidak merata, maka tujuan ini tidak akan tercapai, karena akan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Stabilitas ekonomi suatu negara mungkin terancam oleh pelebaran dan pendalaman kesenjangan pendapatan antara berbagai bagian negara. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan fragmentasi wilayah. (Anshari, Azhar, & Ariusni, 2018).

Ukuran yang dapat dijadikan pedoman dalam melihat disparitas pendapatan di suatu daerah dapat dilihat menggunakan koefisiensi gini atau *gini ratio* yang memiliki nilai antara 0 sampai 1, dimana semakin tinggi *gini ratio*, maka akan semakin tinggi disparitas pendapatan (Hudiyanto, 2017). Jika indeks gini menurun, hal ini menunjukkan bahwa disparitas pendapatan menurun atau masyarakat secara keseluruhan telah mencapai paritas pendapatan. Namun, jika nilai indeks Gini mendekati 1, ini mungkin merupakan indikasi adanya disparitas pendapatan dan hanya sebagian kecil penduduk yang mendapat manfaat dari distribusi kekayaan. Selanjutnya, jika indeks gini kurang dari 0,4, maka tingkat disparitasnya rendah; jika antara 0,4 dan 0,5, maka tingkat disparitasnya sedang; dan jika lebih besar dari 0,5, maka tingkat disparitasnya tinggi. Bandyopadhyay (2017) berpendapat bahwa indeks Gini telah banyak digunakan untuk mengukur tren disparitas dan dapat diperluas ke dalam konteks multidimensi dengan mengukur tingkat kesejahteraan dan disparitas dalam distribusi kesejahteraan yang terjadi antara individu dalam masyarakat di berbagai wilayah. berbagai dimensi, antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Daerah perkotaan besar bukan satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk terjadi kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah atau provinsi yang diuntungkan dari nilai disparitas Indonesia yang tinggi dan menjadi tempat dengan tingkat disparitas yang tinggi. Dengan hanya satu kota besar dan empat kabupaten administratif, provinsi di Indonesia ini memiliki kesenjangan pendapatan terburuk di negara ini. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Rasio Gini, atau *Gini Ratio* dalam skala 0 sampai 1, untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Dengan meningkatnya rasio gini, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan ekonomi yang lebih luas antara berbagai kelompok di provinsi tersebut. Badan Pusat Statistik mengukur *gini ratio* dari jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut merupakan gambar grafik *gini ratio* menurut provinsi dan daerah di Indonesia pada tahun 2021:



Gambar 2. Gini Ratio Provinsi tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data *Gini Ratio* yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 yang ditunjukkan pada gambar 2, diketahui bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia dan menempati urutan pertama dalam disparitas daerah sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Rasio gini pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,436 yang berarti telah melampaui disparitas nasional sebesar 0,381. Disparitas tertinggi selanjutnya berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan nilai indeks 0,411. Kemudian disusul dengan Provinsi Gorontalo sebesar 0,409, Provinsi Jawa Barat dengan nilai indeks 0,406, dan Provinsi Papua dengan nilai indeks 0,396. Sementara provinsi dengan tingkat disparitas terendah berasal dari Provinsi Bangka Belitung dengan nilai indeks hanya berada di angka 0,247.

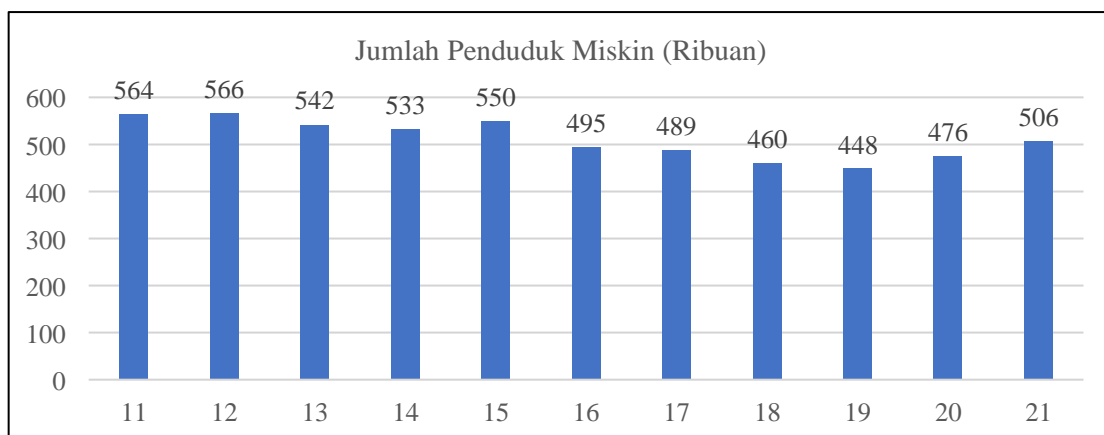
Upaya pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan pada peningkatan ekonomi lokal dan peningkatan taraf hidup setiap orang. Kekayaan alam dan potensi daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi keunggulan kompetitif, namun belum mampu memberikan keunggulan penuh karena kurangnya kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan modal yang masih terbatas di daerah pusat. Hal ini akan mengakibatkan tidak tercapainya keadilan sosial. Tingkat penyebaran di inti kota secara dramatis berbeda dari yang ada di pinggiran kota. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki sedikit dukungan sosial.

Kemiskinan dan disparitas pendapatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi karena sifat pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan dari kedua faktor tersebut. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan semuanya

berinteraksi dalam siklus yang berkelanjutan, dengan kemajuan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata yang pada akhirnya mengarah pada pengurangan kemiskinan. Kemiskinan terjadi ketika suatu populasi memiliki ekonomi yang buruk dan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan solusi jangka pendek daripada mengatasi tantangan ekonomi jangka panjang yang dihadapi oleh mereka yang berada di kelompok sosial ekonomi rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan populasi hanyalah sebagian kecil dari unsur-unsur yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan yang ada di seluruh dunia. Menurut Todaro (2006), rata-rata tingkat pendapatan nasional dan besarnya disparitas atau disparitas distribusi pendapatan merupakan dua unsur yang mempengaruhi seberapa tinggi tingkat kemiskinan suatu negara.

Di Indonesia, kemiskinan bukanlah fenomena baru; sebaliknya, itu telah bertahan selama beberapa dekade. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut, tidak hanya ekonomi, termasuk sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Pendapatan rumah tangga yang rendah merupakan penyumbang utama kemiskinan. Indikasi utama untuk menilai apakah suatu keluarga tergolong miskin adalah jumlah anggota keluarga, sehingga ukuran keluarga yang besar merupakan salah satu tanda bahwa suatu keluarga bisa dikatakan miskin. Itu benar dalam beberapa kasus tetapi tidak pada yang lain.

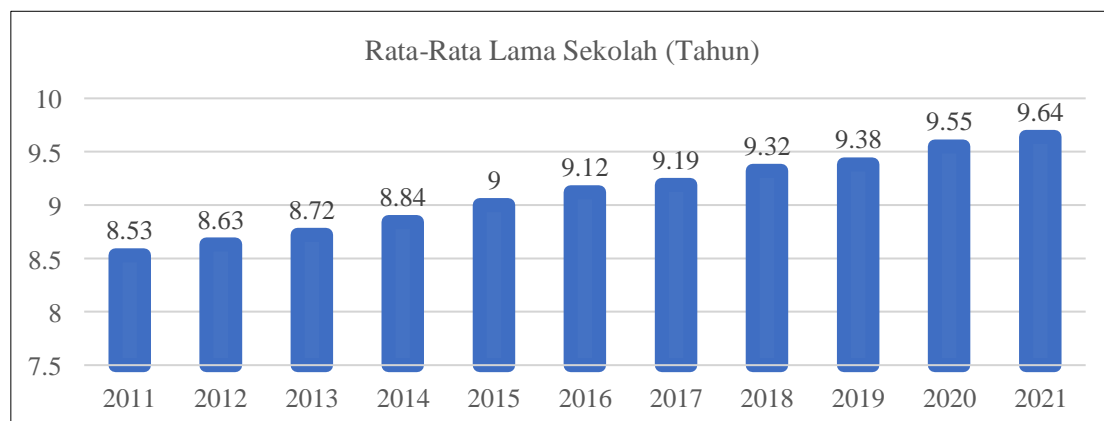
Kualitas yang dimiliki oleh negara-negara berkembang dan kemiskinan, tingkat pendapatan nasional yang rendah dan pembangunan ekonomi yang seringkali bertahap atau stagnan, menyebabkan kedua konsep tersebut digunakan secara bergantian. Pendidikan yang tidak memadai, yang menyebabkan sejumlah besar orang buta huruf dan individu yang tidak memiliki pengalaman atau keterampilan, merupakan salah satu ciri utama negara berkembang yang dapat menjadi sumber kemiskinan. Kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak memadai dan kebiasaan belanja yang boros, hanya sebagian kecil penduduk yang dapat bergabung dengan angkatan kerja. Selanjutnya, kebanyakan orang bekerja di bidang pertanian dan pertambangan, di mana mereka menggunakan apa yang sekarang dianggap sebagai teknik produksi kuno. Grafik berikut menunjukkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011 hingga 2021:



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Gambar 3 di atas merupakan grafik jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2021 dalam ribuan orang. Tren menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk miskin dari tahun 2011-2021 cenderung menurun setiap tahunnya. Tahun 2012 menunjukkan tahun tertinggi dengan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 566.000 orang. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan tahun dengan jumlah penduduk miskin terendah yaitu sebanyak 448.000 orang. Tren penurunan sepanjang periode 2011-2021 mulai berbalik pada tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang merebak ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dalam kebanyakan kasus, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melebihi penciptaan lapangan kerja baru. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto biasanya berkisar sekitar 6% setiap tahun, sementara tingkat pertumbuhan tenaga kerja terus menurun yang dapat disimpulkan bahwa Industri padat modal mendorong ekspansi ekonomi Indonesia. Kesenjangan antara kaya dan miskin juga melebar. Kesenjangan pendapatan daerah tidak membaik meskipun TPAK keluarga berpendapatan rendah lebih besar daripada rumah tangga berpendapatan tinggi. Akibat kecilnya peluang untuk menghasilkan uang dari sumber lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) keluarga berpenghasilan rendah lebih besar daripada rumah tangga berpenghasilan tinggi. Peluang di pasar yang mampu dikejar oleh keluarga berpenghasilan rendah tidak memberikan kualitas hidup yang baik karena pekerjaan tidak terjamin dan tidak ada undang-undang yang melindungi pekerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, jika dibandingkan dengan persentase kepala rumah tangga tidak miskin yang berlatar belakang wajib belajar 9 tahun atau sampai tingkat SMP (32,83%), rumah tangga miskin selalu diidentikkan dengan pendidikan yang rendah. Informasi berikut menggambarkan tren rata-rata lama bersekolah di Provinsi Yogyakarta antara tahun 2011 dan 2021:



Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 4 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah tahun bersekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2021, mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 9,64 persen dan meningkat sebesar 0,94 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9,55. Jumlah tahun yang digunakan dalam pendidikan formal diwakili oleh data, yaitu rata-rata lama bersekolah bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Penduduk Yogyakarta yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menyelesaikan pendidikan menengah setara dua tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan untuk menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Perlu mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif yang merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sistem sekolah negeri di Yogyakarta.

Pengangguran adalah faktor lain yang berkontribusi pada kesenjangan kekayaan antara kota besar dan kecil, di samping kemiskinan dan pencapaian pendidikan. Ketidaksetaraan atau disparitas pendapatan diperparah dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Jika kita bisa menurunkan angka pengangguran, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin juga akan semakin menipis. Menurut statistik BPS 2018, tingkat setengah pengangguran di Indonesia lebih besar dari tingkat pengangguran terbuka di hampir semua wilayah. Mereka yang digolongkan sebagai “setengah pengangguran” adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan, meskipun pekerjaan di bawah standar, dan merupakan sumber pendapatan, sedangkan mereka yang digolongkan sebagai “pengangguran terbuka” tidak. Ini adalah berita yang menggembirakan karena mayoritas orang Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan benar-benar setengah menganggur.

Kesenjangan pendapatan antara orang miskin dan orang kaya akan semakin dalam akibat meluasnya pengangguran. Apergis, Dincer, dan Payne (2011) menemukan bahwa dalam waktu dekat, pengangguran akan memiliki efek positif dan substansial. Informasi Tingkat Pengangguran Terbuka Yogyakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Grafik pada gambar 5 merupakan grafik tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pedesaan dan juga perkotaan. Jika dilihat dari grafik pada gambar 5 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun 2011-2021. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai angka 5.61, hal ini dapat terjadi dipengaruhi oleh munculnya beragam lapangan pekerjaan baru dan tingkat pusat perekonomian yang meningkat sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan, pindah, maupun mondok di perkotaan sehingga pengangguran menjadi tampak lebih banyak. Satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka menurun cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 3.02. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penduduk pedesaan sebagian besar tidak terlalu selektif dalam mencari pekerjaan, sehingga akan cenderung melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti menjadi pekerja keluarga maupun menjadi buruh tidak tetap terutama di sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, dan juga pengangkutan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Angka dan analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, menjadikannya semacam penelitian yang dikenal sebagai "kuantitatif" (Sugiyono, 2013). Data sekunder kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sejumlah publikasi ilmiah menyediakan sebagian besar data penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, dengan informasi tentang berbagai faktor yang diambil dari makalah ilmiah, jurnal, dan publikasi pemerintah.

Teknik Analisis Data

Eviews 10 digunakan untuk melakukan analisis regresi data panel pada data yang dikumpulkan untuk penyelidikan ini. Data deret waktu dan data *cross-sectional* digunakan dalam analisis regresi data panel. Data *cross-sectional* yang sama dapat diperiksa dalam banyak periode waktu dengan menggunakan analisis regresi data panel. Pada penelitian ini persamaan bentuk model adalah sebagai berikut:

$$GR_{it} = \alpha + \beta_1 PM_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

GR	= Gini Ratio
PM	= Persentase Penduduk Miskin
RLS	= Rata-Rata Lama Sekolah
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
α	= Konstanta
β	= Koefisien Variabel
i	= Silang tempat (cross section)
t	= Deret waktu (time series)
ε	= Residu (error)

Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) adalah semua opsi yang layak untuk menilai regresi data panel (Ghozali, 2017). Banyak pengujian, seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Pengali Lagrange (LM), dapat dijalankan untuk menentukan model atau strategi optimal dalam memperkirakan regresi data panel. Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan menggunakan uji Chow untuk melihat mana yang lebih unggul. Tidak diperlukan pengujian tambahan jika Uji Chow dilakukan dengan menggunakan Common Effect Model (CEM). Namun demikian, pengujian lebih lanjut, termasuk Uji Hausman, diperlukan jika Fixed Effect Model (FEM) digunakan. Untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), dilakukan uji Hausman (REM). Setelah model optimal pendugaan regresi data panel ditentukan dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM), dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa persamaan regresi data panel yang diturunkan dapat diandalkan, konsisten, dan tidak memihak. Uji Heteroskedastisitas, Multikolinearitas, dan Normalitas adalah tiga yang membentuk uji asumsi klasik.

Untuk menilai signifikansi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, harus dilakukan uji statistik setelah dilakukan uji asumsi klasik. Menggunakan ambang batas signifikansi = 5% dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa peneliti memiliki peluang 5% untuk salah tentang keseluruhan sampel. Ini menginformasikan pilihan ambang signifikansi statistik 5% untuk pengujian. Uji statistik meliputi koefisien determinasi yang menilai seberapa baik suatu model regresi memperhitungkan data yang diamati, Uji Simultan (Uji F) yang menentukan apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan Uji Parsial (t Test), yang menentukan apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Uji Chow

Dalam estimasi data panel, uji Chow menentukan apakah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) lebih unggul. Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis nol alternatif (H_1) diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari ambang batas signifikansi sebesar 0,05, membuat estimasi Fixed Effect Model (FEM) lebih unggul dari estimasi Common Effect Model (CEM). Estimasi Common Effect Model (CEM) digunakan sebagai gantinya jika nilai probabilitas lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Berikut ini adalah hasil tes utama studi tersebut:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

<i>Redundant Fixed Effect Test</i>			
<i>Effect Test</i>	Statistik	d. f	Probabilitas
<i>Cross-section F</i>	7.206249	(4,47)	0.0001

<i>Cross-section Chi-square</i>	26.305423	4	0.0000
---------------------------------	-----------	---	--------

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Tabel 1 menampilkan hasil uji Chow yang menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak karena nilai probabilitas *Chi-square Cross-section* kurang dari ambang batas signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah pilihan yang tepat.

Uji Hausman

Untuk memutuskan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), digunakan uji Hausman. Jika statistik Hausman, atau yang dikenal juga sebagai *p-value* atau probabilitas penampang acak, bernilai kurang dari 0,05, maka model terbaik adalah FEM, atau hipotesis (H_0) ditolak. Sebaliknya, REM dipilih sebagai opsi terbaik ketika nilai *p* atau probabilitas penampang acak lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Berikut ini adalah temuan dari penggunaan tes Hausman penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

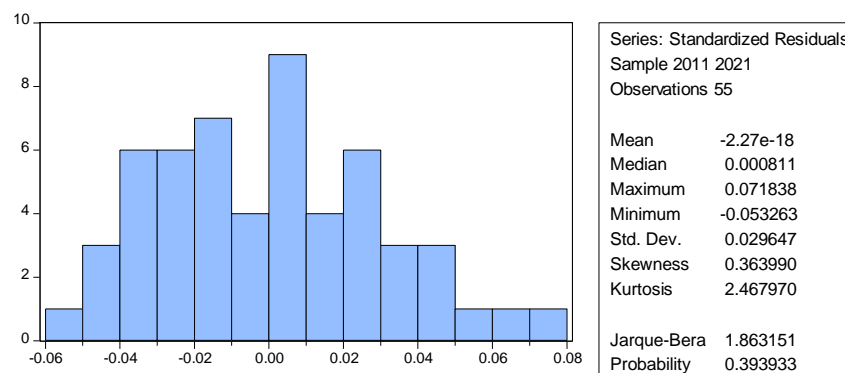
<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	Probabilitas
<i>Cross-section random</i>	9.700239	3	0.0213

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* bernilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0.0213 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Setelah menjalankan Chow Test dan Hausman Test, kita tahu bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah pilihan yang lebih unggul, oleh karena itu kita bisa melewati *Lagrange Multiplier Tes*.

Uji Normalitas

Karena model regresi optimum adalah model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal, maka dilakukan uji Normalitas untuk melihat apakah residual variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2017). Uji normalitas ini menggunakan *Jarque-Bera Test of Histogram Normality* (J-B Test). H_0 ditolak, menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, jika nilai probabilitas statistik *Jarque-Bera* lebih kecil dari ambang signifikansi 0,05 (Ghozali, 2017). Berikut ini adalah temuan dari uji normalitas penelitian:



Gambar 6. Hasil Uji Normalitas

Gambar 6 menunjukkan bahwa Uji Normalitas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal; karena nilai probabilitas *JarqueBera* lebih besar dari ambang batas signifikansi, maka H_0 diterima.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel-variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi satu sama lain. Jika nilai korelasi antar variabel bebas atau variabel bebas lebih kecil dari 0,90 maka model regresi dapat dikatakan tidak dipengaruhi oleh multikolinearitas. Kebalikannya jika koefisien korelasi antara variabel independen lebih tinggi dari 0,90, maka terjadi tanda peringatan multikolinearitas dalam model regresi (Ghozali, 2017). Hasil Uji Multikolinearitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	PM	RLS	TPT
PM	1	-0.5094789935325702	0.187032108546261
RLS	-0.5094789935325702	1	0.6344309093690335
TPT	0.187032108546261	0.6344309093690335	1

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Nilai koefisien pada variabel independen Persentase Penduduk Miskin (PM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kurang dari 0,90, sehingga tidak ada tanda-tanda multikolinieritas pada model (lihat tabel 3 di atas untuk rincian).

Uji Heteroskedastisitas

Kemampuan model regresi untuk memperhitungkan perubahan varian dan data residual dievaluasi dengan menggunakan uji heteroskedastisitas. Uji Glejser akan digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan meregresi variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Dengan tidak adanya bukti heteroskedastisitas, H0 diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05, sedangkan H1 ditolak jika ya. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Probabilitas
C	22.48877	6.484998	3.467815	0.0011
PM	-0.302626	0.139708	-2.166138	0.3552
RLS	-1.317267	0.631420	-2.086197	0.4230
TPT	0.321921	0.392261	0.820681	0.4156

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Probabilitas pada variabel independen Persentase Penduduk Miskin (PM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih dari 0,05, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 di atas dari uji heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa model tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau dikenal juga dengan Uji Simultan, menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan atau tidak. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas lebih kecil dari ambang signifikansi 0,05. Baik variabel independen maupun dependen secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen. Berikut ini adalah temuan dari uji F yang digunakan dalam penyelidikan ini:

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

F-statistik	17.52792
Probabilitas (F-statistik)	0.000000

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Nilai probabilitas F-statistik adalah 0,000000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berdasarkan temuan uji simultan (Uji F) yang disajikan pada tabel 5 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa *Gini Ratio* (GR) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2021 dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas yaitu Persentase Penduduk Miskin (PM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik secara individual maupun gabungan.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t, atau uji t parsial, menentukan apakah faktor independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menyimpulkan bahwa variabel independen memang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka H_1 diterima jika nilai t estimasi lebih besar dari t tabel atau nilai probabilitas lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Berikut ini adalah temuan uji t dari penyelidikan ini:

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Probabilitas
C	-0.248421	0.132222	-1.878822	0.0665
PM	0.004732	0.001786	2.649456	0.0109
RLS	0.055493	0.013694	4.052248	0.0002
TPT	0.005927	0.004727	1.253918	0.2161

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Hasil uji parsial (uji t) dapat dijelaskan bahwa:

- Variabel Persentase Penduduk Miskin (PM) memperoleh nilai t-statistik sebesar 2.649456 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0109. Dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel menggunakan taraf signifikansi $\alpha=5\%$ dan $df=51$, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.675. Maka nilai t-statistik 2.649456 bernilai lebih besar dari t-tabel yaitu 1.675 ($2.649456 > 1.675$) serta nilai probabilitas bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.0109 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Persentase Penduduk Miskin (PM) berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan (GR). Selain itu nilai koefisien Persentase Penduduk Miskin (PM) sebesar 0.004732 menunjukkan bahwa variabel Persentase Penduduk Miskin (PM) berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan (GR).
- Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memperoleh nilai t-statistik sebesar 4.052248 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002. Dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel menggunakan taraf signifikansi $\alpha=5\%$ dan $df=51$, nilai 1,675 ditemukan di t-tabel. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari ambang signifikansi ($0,0002 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai t-statistik 4,052248 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,675 ($4,052248 > 1,675$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel RLS berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan (GR). Selain itu, variabel rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh positif terhadap selisih pendapatan yang ditunjukkan dengan nilai koefisiennya sebesar 0,055493
- Nilai t-statistik untuk Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 1,253918, dengan probabilitas 0,2161. Nilai t-tabel sebesar 1,675 dihitung dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan tingkat signifikansi $=5\%$ dan ukuran sampel $df=51$. Karena nilai probabilitas lebih dari ambang batas signifikansi ($0,2161 > 0,05$), maka menerima H_0 dan menolak H_1 , karena nilai t-statistik 1,298001 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,675 ($1,253918 < 1,675$). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tampaknya berdampak kecil terhadap disparitas

pendapatan (GR). Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan yang ditunjukkan dengan nilai koefisiennya sebesar 0,005927.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran statistik sejauh mana model regresi menyumbang varians dalam variabel dependen. Antara nol dan satu, koefisien determinasi dapat ditemukan. Tidak ada hubungan antara variabel dependen dan independen jika koefisien determinasi (R^2) sangat kecil atau sama dengan 0. Koefisien determinasi penelitian ini terlihat seperti ini:

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-Squared</i>	0.723033
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.681783

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang disesuaikan adalah 0,681783 berdasarkan data pada tabel 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka merupakan prediktor yang signifikan terhadap variabel dependen, rasio gini (GR), di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 68,17% sedangkan sisanya 31,83% memiliki penjelasan potensial dalam variabel kontrol penelitian.

3.2. Pembahasan

Pemilihan model terbaik penelitian ini didasarkan pada analisis yang dilakukan dengan menggunakan *Fixed Effects Model* (FEM). Berikut hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 8. Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Probabilitas
C	-0.248421	0.132222	-1.878822	0.0665
PM	0.004732	0.001786	2.649456	0.0109
RLS	0.055493	0.013694	4.052248	0.0002
TPT	0.005927	0.004727	1.253918	0.2161

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10, 2022

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil estimasi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) pada tabel 8 di atas adalah sebagai berikut:

$$GR = -0.248421 + 0.004732 PM + 0.055493 RLS + 0.005927 TPT$$

Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Disparitas Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara nilai koefisien persentase 0,004732 untuk Penduduk Miskin (PM) dan nilai probabilitas 0,0109. Temuan menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2021, Persentase Penduduk Miskin (PM) di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap disparitas pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, jika semua hal lain dianggap sama, disparitas pendapatan akan meningkat sebesar 0,004732% untuk setiap kenaikan 1% dalam Persentase Penduduk Miskin (PM). Temuan analisis regresi menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan melebar ketika jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan meningkat dan menyempit ketika jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan turun. Salah satu unsur yang berkontribusi terhadap melebarnya kesenjangan pendapatan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar adalah kemiskinan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tahunan yang cenderung turun, yang berarti bahwa penduduk menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ketika orang-

orang dalam suatu komunitas bekerja sama untuk meningkatkan standar hidup mereka, disparitas pendapatan menyusut. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurangi kemiskinan, seperti memberikan pelatihan kerja gratis dengan harapan masyarakat dapat mulai melakukan kegiatan wirausaha untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, tidak dapat dipisahkan dari penurunan disparitas pendapatan dari penurunan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Disparitas Pendapatan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh yang cukup besar, dengan nilai koefisien sebesar 0,055493 dan nilai probabilitas sebesar 0,0002. Temuan menunjukkan bahwa RLS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap disparitas pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 2011 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa, jika semua hal lainnya sama, kesenjangan pendapatan melebar sebesar 0,055493 poin persentase untuk setiap kenaikan poin persentase dalam Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Analisis regresi menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan melebar dengan meningkatnya rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah untuk mengejar semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, dan menyempit ketika rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk mengejar semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. menurun. Rata-rata siswa Provinsi Yogyakarta menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah setiap tahun, yang menunjukkan sistem pendidikan berkualitas tinggi; Namun demikian, tren ini dapat menyebabkan surplus pencari kerja jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Selain itu, pekerja yang berpendidikan lebih tinggi dianggap memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda dengan pekerja yang berpendidikan lebih rendah, dan berdampak pada besarnya uang yang diperoleh, yang akan menimbulkan disparitas antara pekerja yang berpendidikan tinggi dan rendah. Akibatnya akan terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Disparitas Pendapatan

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara Pengangguran Terbuka (TPT) dengan tingkat pendidikan, dengan nilai koefisien tingkat 0,005927 dan nilai probabilitas 0,2161. Temuan menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan disparitas pendapatan untuk setiap kenaikan poin persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2021, tidak ada korelasi yang jelas antara tingkat pengangguran yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan disparitas pendapatan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran yang sangat fluktuatif, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperkirakan akan meningkat pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi persoalan baru akibat Wabah Covid-19 yang mengubah rutinitas masyarakat yaitu masih banyak angkatan kerja yang sudah menyelesaikan pendidikannya namun belum terserap oleh pasar tenaga kerja yang ada.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa penduduk berpenghasilan rendah, tingkat pendidikan rata-rata, dan tingkat pengangguran terbuka semuanya berperan dalam lebarnya disparitas pendapatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara kemiskinan dan disparitas pendapatan, yang menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan akan menyebabkan kenaikan disparitas pendapatan. Demikian pula, ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara pencapaian pendidikan dan disparitas pendapatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pencapaian pendidikan akan menyebabkan peningkatan disparitas pendapatan.

4.2 Saran

Peneliti dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan dan memaksimalkan Sumber Daya Alam yang tersedia, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan meningkatkan produktivitas sehingga orang bisa terbebas dari jurang kemiskinan. Penyebaran temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi disparitas pendapatan dengan meningkatkan kesadaran akan nilai pendidikan dan korelasi antara pendidikan dan pendapatan selanjutnya.

5. REFERENSI

- Afandy, A., Rantung, V. P., & Marashdeh, H. (2017). Determinants of Income Inequality. *Economic Journal of Emerging Markets*, 159-171.
- Agüero, J., Carter, M. R., & May, J. (2007). Poverty and Inequality in the First Decade of South Africa's Democracy: What can be Learnt from Panel Data from KwaZulu-Natal? *Journal of African Economies*.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia. *EcoGen, Volume 1*, Nomor 3.
- Apergis, N., Dincer, O., & Payne, J. (2011). On the dynamics of poverty and income inequality in US states. *Journal of Economic Studies*, vol. 38(issue 2), 132143.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan (5th ed)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ashenfelter, O., & Rouse, C. (2000). *Schooling, Intelligence and Income in America*. In: Arrow, K., Bowles, S., Durlauf, S. (Eds.), *Meritocracy and Economic Inequality*. Princeton: Princeton Univ Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2022, November). Retrieved from Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kot (Persen): <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/291/1/tingkat-pengangguran-terbukakab-kot.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2022, November). Retrieved from Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen): <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/1/persentase-penduduk-miskinmenurutkabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2022, November). Retrieved from Rata-rata Lama Sekolah (Tahun):<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/318/1/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Bandyopadhyay, S. (2017). The absolute Gini is a more reliable measure of inequality for time. *Economics Letters*(162), 1-15.
- Bappeda Provinsi DIY. (2022, November). Retrieved from Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/703-ketimpangan
- Blundell, R., Joyce, R., Keiller, A. N., & Ziliak, J. P. (2018). Income inequality and the labour market in Britain and the US. *Journal of Public Economics*, 48-62.
- Cysne, R. P., & Turchick, D. (2012). Equilibrium Unemployment-Inequality Correlation. *Journal of Macroeconomics*, 454-469.

- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *EJurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15-25.
- Danim, S. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dartanto, T., & Putra, N. E. (2019, January 28). *Ketimpangan Kesempatan Jadi Penyebab Ketimpangan Pendapatan*. Retrieved from www.feb.ui.ac.id
- Deyshappriya, N. (2017). *Impact of Macroeconomic Factors on Income Inequality and Income Distribution in Asian Countries (No. 696)*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Fithrian, M., Syechalad, N., & Nasir, M. (2015). Analisis Pengaruh Agregat Demand Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 23-32.
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivaroant dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship between GrowthInequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1), 57-71.
- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 8(No. 3), 250-265.
- Hu, Z. (2021). The effect of income inequality on human capital inequality: Evidence from China. *Structural Change and Economic Dynamics*, 471-489.
- Hudiyanto. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Kasihan Bantul: Lingkar Media.
- ILO. (2013). *Trend Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013*. Jakarta: ILO.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) "Tahap Analisis". *Blog Dosen Perbanas*, 1-7.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juanda, Bambang, & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Khoirudin, R. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 15, No. 1.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- M. A., Z. A., & Ariusni. (2018). ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA. *EcoGen, Volume 1*, Nomor 3.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics an Asian (2nd ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martins, P. S., & Pereira, P. T. (2004). Does Education Reduce Wage Inequality? Quantile Regression Evidence from 16 Countries. *Labour Economics*, 11, 355371.
- Nielson, F., & Alderson, A. S. (2015). The Kuznets Curve and The Great U-Turn: Income Inequality in U.S. Counties, 1970 To 1990. *American Sociological Review*, 62(1), 12-33.
- Nurani, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 52-67.

- Octavia, & Shavira, H. (2021). ANALISIS PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 9* (No 2).
- Peters, D. J. (2011). Persistent Place-Based Income Inequality in Rural Nebraska, 1979-2009. *Great Plains Research*, 21.
- Rubiarko, S. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011. *Jurnal Ilmiah*.
- Sanz, R., Peris, J. A., & Escamez, J. (2017). Higher education in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain. *Journal of Innovation & Knowledge*, 53-66.
- Sari, R. I. (2021). ANALISIS PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2014-2019. *Jurnal Ilmiah*.
- Sholikah, N. R., & Imaningsih, N. (2022). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Serta Pengaruhnya Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 247-253.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sukirno. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunengsih. (2009). *Kajian Analisis Regresi dengan Data Panel*.
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 34-43.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Informasi*, 213-219.
- Todaro, Michael.P, Smith, & Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, D. (2021). Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 121-137.
- Wahyuni, R. T., & Monika, A. K. (2016). PENGARUHPENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA DI INDONESIA. *JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA 2016, Vol. 11*(No. 1), 15-28.
- Wallace, M., Hyde, A., & Vachon, T. E. (2022). States of Inequality: Politics, labor, and rising income inequality in the U.S. States since 1950. *Research in Social Stratification and Mobility*, 78.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Winarno, W. W. (2007). *EvIEWS: Analisis Ekonometrika dan Statistika*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.